

[Tiga Tahun Perang Rusia--Ukraina \(7-habis\): Berharap Negosiasi dan Penyelesaian Damai](#)

Ditulis oleh Wella Sherlita pada Rabu, 25 Juni 2025



Banyak pihak yang pesimistis dengan kebijakan luar negeri nonblok yang dianut Indonesia, termasuk di Ukraina. Bahkan, pemuka agama Islam Krimea menduga pemimpin Indonesia kurang peduli dengan nasib rakyat Ukraina. Namun, pandangan ini dipatahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, saat menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Jumat (20/6). Bagaimanapun, gencatan senjata harus dikedepankan.

Di hadapan ratusan pemimpin dunia dan pimpinan bisnis terkemuka dari berbagai negara, Presiden RI, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip nonblok dan solusi damai atas konflik global.

Dalam diskusi sesi pleno yang digelar di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, ia mengatakan, Indonesia telah lama memegang teguh posisi nonblok dan selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata, termasuk dalam situasi di Ukraina. Kepala Negara juga menyinggung usulan gencatan senjata yang pernah disampaikan Indonesia dua tahun lalu.

Foto: Dok. Setneg

“Dalam konflik di Ukraina, saya kira dua tahun lalu, kami mengusulkan gencatan senjata segera di tempat. Dan saat itu, tanggapan dari pihak Rusia cukup terbuka, bahkan sangat positif,” ungkap Prabowo.

Ia lalu mencontohkan situasi di Semenanjung Korea sebagai model gencatan senjata yang efektif menjaga stabilitas, meskipun konflik secara resmi belum selesai.

“Bahkan di Korea saat ini, antara Korea Utara dan Korea Selatan ada zona demiliterisasi yang disupervisi oleh PBB. Perang Korea belum berakhir secara resmi, namun ada kondisi damai yang tercipta,” jelas Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI juga menekankan bahwa Indonesia akan terus mendorong diplomasi dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global, tanpa harus memihak atau tunduk pada tekanan dari pihak manapun.

Baca juga: Inilah Profil 7 Profesor yang Meninggal karena Covid-19

Penyelesaian Damai secara Islami

Sebelumnya di Kyiv, Said Ismagilov, pimpinan atau Mufti Pusat Dewan Islam Tatar Krimea di Kyiv, sangat berharap dukungan pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk membantu Krimea. Ia mengatakan hal itu saat menerima beberapa jurnalis dari Indonesia di Kyiv, termasuk kontributor *Alif.id*, Wella Sherlita.

Ismagilov mengaku sempat 3-4 kali mengirimkan surat kepada Duta Besar RI untuk Ukraina, namun belum memperoleh jawaban. Ismagilov tidak merinci lebih jauh bantuan apa saja yang dibutuhkan, apakah secara moral politik atau dukungan materi.

Mufti Pusat Dewan Islam Tatar Krimea, Said Ismagilov
(tengah). Foto: Wella Sherlita

“Secara singkat, kami semua rakyat Ukraina termasuk kaum muslim, berharap Tuhan segera mendatangkan bantuan. Kami juga berharap media di Indonesia dapat ikut menyebarkan informasi mengenai keadaan kami di sini,” harap Ismagilov.

Setelah berbincang dengan Ismagilov, kami pun menuju Pusat Kebudayaan Islam– ICC Dumark/AMU di Kyive untuk berjumpa Mufti Krimea, Ayder Rustemov. Ia memberikan petunjuk sejuk sambil menunjukkan bagian dalam masjid yang dikelola Rustemov, yang sempat hancur akibat ledakan misil Rusia tahun 2022.

Ayder Rustemov (Foto: Wella Sherlita)

Saya menanyakan, mengapa penyelesaian konflik negara-negara Islam kerap melibatkan Barat, seperti perang Hamas-Israel yang melibatkan AS, meski Mesir dan Qatar juga diikutsertakan sebagai mediator. Adapun Arab Saudi justru memimpin pasukan koalisi yang memerangi Yaman. Belum lagi posisi strategis Iran yang mendukung Suriah, Hamas, dan Hizbullah di Lebanon, hingga berujung pada konflik terbuka dengan Israel.

Baca juga: [NU Care Jajaki Kerja Sama dengan Lembaga Sosial di Bosnia](#)

Baca tulisan

sebelumnya: <https://alif.id/read/wls/tiga-tahun-rusia-ukraina-solidaritas-bucha-nezlamma-dari-warga-untuk-warga-b251112p/>

Rustemov menjawab bahwa sekarang ini banyak konflik terjadi, pecah di sesama negara Islam karena mereka tidak lagi merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis untuk menyelesaikan masalah. "Jika ingin damai, maka (negara-negara Islam) harus melakukan hal yang sesuai dengan cara-cara Islam," katanya.

Ayder Rustemov

Politikus Krimea dan Jurnalis Ungkap Kebohongan Rusia

Refat Chubarov, anggota Parlemen Ukraina sekaligus Deputy Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Tatar Krimea, mengungkapkan bagaimana anak-anak di sejumlah daerah pendudukan diambil dan dibawa ke Krimea, lalu masuk ke Rusia atau Belarusia. Anak-anak itu kebanyakan berasal dari Ukraina Timur. Di sana, mereka dipaksa untuk belajar bahasa Rusia.

Refat Chubarov, anggota parlemen Ukraina/Deputi Kepala Daerah Perwakilan Rakyat Tatar Krimea.

“Perkiraan kami anak-anak Ukraina yang dibawa ke Rusia itu sekitar 500 ribu anak. Sementara data pemerintah Rusia mengatakan jumlahnya 136.400 anak. Rusia memiliki

masalah dengan demografi. Anak-anak yang dilarikan ke Rusia itu usianya antara nol (bayi baru lahir) hingga 18 tahun,” kata Chubarov kepada *Alif*.

Lebih jauh ia mengatakan, Rusia membangun kamp militer yang mengajarkan bagaimana anak-anak berkelahi dan menggunakan senjata.

“Ada kejadian nyata ketika anak-anak yang dibawa ke kamp militer Rusia pada 2014, kini berjuang melawan tentara Ukraina di Ukraina Timur,” ujar Chubarov.

Baca juga: Kisah-kisah Mitos di Yogyakarta

Jurnalis Diterjunkan Di Medan Tempur

Maksym Butkevych adalah jurnalis yang sempat bertempur di garis depan di Luhansk, pada 2022. Jabatannya saat itu adalah Komandan Regu Infantri. Selain bekerja di media, Butkevych juga aktif sebagai aktivis HAM.

Maksym Butkevych (kiri), jurnalis yang ditahan tujuh bulan oleh Rusia.

“Bergabung dengan Angkatan Darat Ukraina adalah pilihan yang terpaksa saya ambil. Tak ada warga sipil yang mau ditugaskan di garis depan,” ungkap Butkevych yang kami temui di sebuah kedai kopi di pusat kota Kyiv, pada akhir Mei lalu.

Ia dibebaskan pada Oktober 2024 setelah tujuh bulan ditahan di penjara Rusia. Butkevych masuk dalam daftar pertukaran tahanan bersama 58 warga sipil lainnya,

“Rusia menahan banyak jurnalis, termasuk di Krimea. Mereka tidak ingin kejahatan mereka disebarluaskan oleh media. Tapi ini kan hak dasar (kebebasan berbicara dan berpendapat) bagi warga untuk mengambil sikap atas apa yang terjadi,” kata Butkeyvich.

Maksym Butkeyvich

Saat ini, pemerintah dan Angkatan Darat Ukraina menjalankan program rehabilitasi dan reintegrasi untuk para mantan napi. Ia menambahkan, Rusia telah melanggar Konvensi Jenewa ke-3. Banyak jurnalis yang ditahan tanpa peradilan, bahkan ribuan orang dijadikan tawanan. Para tahanan –termasuk jurnalis kerap menerima berbagai bentuk penyiksaan.

Melihat kompleksitas masalah yang dihadapi warga sipil Ukraina, maka pernyataan Prabowo di St. Petersburg mengenai gencatan senjata sangat penting, dan semoga bisa menjadi awal pembuka jalan menuju negosiasi damai.